

BAB V

KESIMPULAN

Sistem internasional selama beberapa dekade terakhir lebih banyak didominasi oleh isu-isu ekonomi dan keamanan non-konvensional. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah menjadikan kawan dan lawan sebagai kompetitor. Secara tidak langsung, globalisasi ekonomi juga mendorong meningkatnya tren regionalisme dan pembentukan *Free Trade Agreement (FTA)* baik yang bersifat bilateral maupun perjanjian FTA dalam bentuk *trading blocs*. Wacana pembentukan integrasi ekonomi ASEAN semakin menguat pasca guncangan krisis Asia 1997. Meningkatnya upaya integrasi ekonomi kawasan dapat pula dikatakan sebagai respon untuk menghadapi dampak negatif globalisasi.

FTA akan berfungsi secara optimal apabila hubungan ekonomi dan perdagangan antar anggotanya bersifat komplementer, sebaliknya hubungan ekonomi yang bersifat non-komplementer akan meningkatkan iklim kompetisi antar anggota. Kondisi terakhir inilah yang mewarnai hubungan perekonomian antar anggota ASEAN dan antara ASEAN dengan China. Masing-masing negara memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, sehingga integrasi ekonomi ASEAN dan ACFTA juga akan memberikan dampak yang berbeda terhadap kondisi perekonomian anggotanya. Ketimpangan (*gap*) yang terdapat di kawasan menyebabkan tidak semua negara dapat memperoleh manfaat dari globalisasi (*the fruits of globalization*).

Dalam menghadapi pengaruh ekonomi China di Asia Tenggara, negara-negara di kawasan perlu merealisasikan integrasi ekonomi secara menyeluruh. Namun di sisi lain, integrasi ekonomi juga berpotensi untuk meningkatkan iklim kompetisi dan ditengarai dapat mengakibatkan ketimpangan yang lebih jauh antar negara-negara anggota. Dengan demikian, dibutuhkan strategi domestik yang efektif dalam menghadapi rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, sementara di level regional, dibutuhkan hubungan yang solid antar anggota ASEAN untuk dapat menghadapi perkembangan ekonomi dan pengaruh China di kawasan. Dalam menganalisis kemajuan perekonomian China, peran sektor UKM tidak dapat dikesampingkan. Tren pemberdayaan UKM secara global juga cenderung meningkat terutama pasca krisis Asia 1997 yang memperkuat

pendapat bahwa korporasi asing dan sektor usaha besar justru lebih rentan terhadap krisis ekonomi. Ada beberapa poin penting lainnya yang perlu ditekankan dalam memperhitungkan peran UKM baik secara domestik maupun regional, yaitu bahwa sektor UKM merupakan salah satu komponen stabilisator sosial-ekonomi masyarakat yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Secara umum, sektor UKM masih mengalami hambatan teknis dalam mengembangkan usahanya sementara itu liberalisasi perdagangan telah dimulai sebelum sektor usaha domestik benar-benar siap menghadapi kompetisi. Dalam perencanaan strategi perekonomian nasional, sektor UKM Indonesia belum mendapatkan prioritas utama, berbeda halnya dengan program perekonomian di Thailand dan Malaysia yang sudah mulai difokuskan pada strategi pengembangan UKM dan usaha berbasis masyarakat. Apabila dilihat dari sudut pandang kesiapan strategi dan implementasi kebijakan, daya saing Indonesia secara umum masih tertinggal dibandingkan dengan sektor UKM Thailand dan Malaysia. Aspek-aspek politik dan birokrasi sistem pemerintahan dalam negeri yang kurang kondusif masih menjadi penghambat dalam upaya pemberdayaan UKM di Indonesia.

Kesuksesan China dalam mengembangkan sektor UKM-nya sudah diakui secara global. Melalui UKM, China telah berhasil mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang diakibatkan oleh globalisasi. Dua per tiga kegiatan perekonomian China didominasi oleh UKM. China juga telah berhasil menciptakan sektor UKM yang tangguh, kompetitif, dan menjadi bagian penting dalam *global supply chain*. Keberhasilan China dalam membangun perekonomiannya melalui sektor UKM didorong oleh beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan faktor kepemimpinan (*leadership*). China menekankan perlunya pengembangan UKM sebagai prioritas utama. Pemerintah China juga telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas KKN, sehingga China memperoleh 'kepercayaan' dari dunia internasional, salah satunya dalam bentuk perolehan FDI. China menunjukkan perlunya penguatan institusi negara sebagai pusat kontrol dan pengambil keputusan terhadap berbagai kebijakan ekonomi dan pengembangan UKM. Liberalisasi perdagangan dan modernisasi ekonomi di China ditopang pula oleh sistem politik yang transparan, *good governance*, dan *accountable*. Demi memperkuat struktur perekonomiannya, pemerintah China mengesampingkan prinsip-prinsip ideologis yang selama ini mengakibatkan friksi dengan kelompok

negara barat dan bersikap lebih pragmatis dalam menghadapi liberalisasi ekonomi. Dengan demikian, kasus China menunjukkan bahwa stabilitas politik dan kuatnya institusi negara merupakan dua kunci utama bagi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Di kawasan Asia Tenggara, sektor UKM Thailand dan Malaysia sudah diakui sebagai 'pemain' regional yang kompetitif dan diharapkan dapat mendorong kemajuan perekonomian kawasan. Namun demikian, negara-negara ASEAN masih berjalan sendiri-sendiri dalam mewujudkan sektor UKM regional yang solid dan kompetitif. Akibatnya, walaupun memiliki kualitas produk yang relatif lebih baik dibandingkan produk China, produk ASEAN belum dapat menandingi harga produk China yang lebih kompetitif. Di sisi lain, banyaknya sektor UKM yang beroperasi di China, menyulitkan pemerintah China dalam melakukan kontrol kualitas. China juga seringkali menghadapi berbagai klaim dari dunia internasional akibat kondisi produk-produknya yang kurang memperhatikan standar kesehatan dan keamanan internasional.

Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, Indonesia juga akan menghadapi berbagai tantangan, yaitu Pasar Tunggal ASEAN, dominasi ekonomi China, dan tantangan untuk mengedepankan *domestic interest*. Integrasi ekonomi ASEAN akan meningkatkan iklim kompetisi regional. Dalam sistem ekonomi pasar, kesuksesan suatu negara akan lebih ditentukan oleh faktor *competitive advantage*. Daya saing Indonesia saat ini merupakan yang terendah di kelompok negara ASEAN-5. Sektor UKM Indonesia juga belum mendapatkan prioritas dalam cetak biru perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia belum memiliki visi pembangunan yang berkesinambungan dan mandiri, sehingga terus menerus mengalami ketergantungan terhadap investasi asing. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Thailand telah memiliki strategi pengembangan UKM yang jelas dan terarah, sehingga lebih siap dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN. Dalam menghadapi pengaruh dan dominasi ekonomi China di kawasan, negara-negara ASEAN tidak dapat berdiri sendiri. Indonesia juga perlu memanfaatkan ASEAN sebagai sarana yang efektif dalam membendung kekuatan ekonomi China. Krisis kepemimpinan di ASEAN dapat dijadikan sebagai celah bagi Indonesia untuk kembali berperan aktif sebagai *leader*. Hubungan perdagangan intra-ASEAN yang bersifat non-komplementer dapat dimanfaatkan untuk menghadapi produk-produk unggulan

China yang juga bersifat non-komplementer terhadap ASEAN. Produk-produk unggulan intra-kawasan dapat diarahkan untuk saling mensubstitusi antara satu dengan yang lainnya. Melalui prinsip *regional production network*, efisiensi dan produktifitas regional dapat ditingkatkan untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi China. Institusi regional yang solid juga dapat meningkatkan *leverage* kawasan di level internasional. Sementara itu di dalam negeri, pemerintah Indonesia perlu mengedepankan *national interest* dan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat yang lebih pragmatis. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua komponen yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Di Indonesia, perubahan peta politik dan sistem pemerintahan yang tidak *sustainable* merupakan permasalahan klasik yang hingga kini masih menyebabkan stagnasi perekonomian nasional.

Dari sudut pandang ekonomi-politik, kasus perkembangan ekonomi China, serta keberhasilan pemberdayaan UKM Thailand dan Malaysia, dapat dijadikan sebagai *lesson learned* bagi Indonesia. Dalam lingkup domestik, China menempatkan permasalahan dalam negeri sebagai prioritas. Stabilitas sosial-ekonomi dalam negeri menciptakan struktur kenegaraan yang solid dan iklim usaha yang *predictable*. Tata aturan hukum ditegakkan secara transparan, negara menekankan prinsip keterbukaan terhadap pihak luar. Di kelompok negara-negara berkembang, China merupakan negara penerima FDI terbesar di dunia, namun pemerintahnya (negara) tetap memegang kendali dan tidak lantas 'tunduk' terhadap kebijakan negara lain. Kebijakan luar negeri suatu negara akan lebih *optimal* apabila didukung pula oleh *domestic policy* yang tepat. Dalam kasus China, *foreign policy* yang dikeluarkan oleh pemerintah telah mencerminkan kepentingan domestik. China juga sudah diakui sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh dalam arena internasional.

Di tengah arus globalisasi dan regionalisme, suatu negara tidak dapat lagi mengadakan aksi konfrontatif terhadap negara lain, karena friksi-friksi politik di kawasan dapat mempersulit pembangunan perekonomian dalam negeri. Salah satu langkah penting pemerintah China adalah mengesampingkan friksi-friksi politik-ideologis dengan negara-negara barat demi kemajuan perekonomian domestiknya. Prinsip serupa sebaiknya dipertimbangkan pula oleh negara-negara ASEAN yang masih belum mampu mengesampingkan friksi politik antar anggotanya. Kurangnya *political will* dari negara-negara ASEAN dapat

menyebabkan integrasi ekonomi regional yang solid sulit tercapai. Friksi politik dengan negara tetangga juga dapat mengakibatkan terganggunya proses pembangunan nasional, karena untuk menghadapi liberalisasi ekonomi, prinsip kerjasama perlu diutamakan. Secara umum, struktur kenegaraan yang solid dapat mempertahankan stabilitas ekonomi-politik domestik dan selanjutnya dapat meningkatkan daya tawar negara yang bersangkutan secara global.

Kesempatan Indonesia untuk meraih kesuksesan dari liberalisasi perdagangan di level regional ASEAN, akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor usaha domestik, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Strategi dan kebijakan yang tepat merupakan gerbang utama yang menentukan keberhasilan program pengembangan UKM. Dengan demikian, cetak biru UKM nasional perlu segera dirumuskan agar tercipta koordinasi yang berkesinambungan antar institusi pemerintah baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, diperlukan *benchmark* nasional untuk menyeragamkan dan meningkatkan daya saing produk domestik agar lebih sesuai dengan standardisasi regional dan internasional.

Dalam perumusan konsep pembangunan nasional, diperlukan cara pandang secara holistik, yaitu dengan merubah paradigma pembangunan tradisional menjadi lebih pragmatis. Paradigma pembangunan nasional tradisional yang secara umum merupakan fungsi dari MNCs (*M*), Industri Minyak dan Gas Bumi (*MG*), *International Institution* seperti IMF dan *World Bank* (*I*), *Political Gain* (*PG*), Kepentingan Kelompok (*Gf*), Desentralisasi dan Dekonsentrasi Kebijakan (*DD*), dan Ego Politik / Konfrontasi Regional (*RC*); perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek-aspek praktis dan pragmatis, sehingga paradigma baru pembangunan nasional, secara umum merupakan fungsi dari Pengembangan UKM dan Usaha Berbasis Masyarakat (*UKM*), Industri Non-Migas (*NMG*), Fokus pada *Regional Institution* (*RI*), *Political Reliance / Clean Government* (*PR*), Kesejahteraan Sosial / Kepentingan Nasional (*NI*), Sentralisasi dan Konsentrasi Kebijakan (*SK*), *Political Will / Kerjasama Regional* (*RCo*), Perbaikan Infrastruktur (*Pf*), Peningkatan Pendidikan (*E*), *Law Enforcement* (*LE*), Perbaikan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT*), dan seterusnya. Dengan kata lain, perlu ada perubahan paradigma pembangunan perekonomian nasional (*ND*) dari formula matematika :

$NDt = f \{M, MG, II, PG, GI, DD, RC, \text{ dan seterusnya}\}$

menjadi

$ND = f \{UKM, NMG, RI, PR, NI, SK, Rco, PI, E, LE, ICT, \text{ dan seterusnya}\}.$

Cara pandang holistik dan pragmatis tersebut dapat dikatakan lebih relevan dan sinergis dengan kepentingan pembangunan nasional dan keikutsertaan negara dalam liberalisasi ekonomi. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi China dan Pasar Tunggal ASEAN 2015, Indonesia perlu mengejar ketertinggalannya dari negara-negara tetangga, terutama dalam hal peningkatan daya saing. Belajar dari kesuksesan China, Thailand, dan Malaysia, upaya pengembangan sektor usaha domestik bukan merupakan persoalan teknis semata, namun juga sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan serta stabilitas sosial-ekonomi-politik dalam negeri.

